Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi X
Minggu ke-1 April
(1 s.d. 7 April 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PEMETAAN MUTU MELALUI RAPOR PENDIDIKAN

Fieka Nurul Arifa
Peneliti Pertama
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kesenjangan mutu pendidikan antardaerah masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Pada tanggal 1 April 2022, Kemendikbudristek meluncurkan Rapor Pendidikan sebagai acuan untuk memetakan dan memperbaiki mutu pendidikan. Rapor Pendidikan dikembangkan berdasarkan amanat PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan memuat data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan.

Melalui Rapor Pendidikan, dinas pendidikan dapat melihat secara makro isu-isu pendidikan di daerah masing-masing, maupun melihat berdasarkan jenjang yang menjadi fokus seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) satuan pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik yang terdiri dari kemampuan literasi dan numerasi, serta indeks karakter. Tidak hanya dinas pendidikan dan satuan pendidikan, masyarakat juga dapat mengakses Rapor Pendidikan.

Rapor Pendidikan menyajikan hasil Asesmen Nasional (AN) dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi. Rapor Pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi diri, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data.

Kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia terpotret dari hasil evaluasi sistem pendidikan di semua tingkat satuan pendidikan melalui AN. Hasil AN tahun 2021 yang dilaksanakan Kemendikbudristek di 259.000 satuan pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat menunjukkan bahwa kompetensi literasi dan numerasi siswa belum memenuhi standar minimum, di mana kondisi tertinggi terjadi pada jenjang SD dan SMP yang merupakan jenjang wajib belajar di Indonesia. Kesenjangan antardaerah terjadi di mana performa salah satu satuan pendidikan terbaik di salah satu kabupaten di luar Pulau Jawa setara dengan performa terburuk salah satu satuan pendidikan di salah satu kabupaten di Pulau Jawa. Satuan pendidikan terbaik dan terburuk di satu daerah juga memiliki kesenjangan yang tinggi. Sementara itu, karakter siswa dilihat dari Profil Pelajar Pancasila menunjukkan bahwa siswa kuat pada aspek beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, dan kreativitas. Tetapi rendah pada aspek nalar kritis, gotong-royong, dan kemandirian.

Survei lingkungan belajar untuk mengukur faktor yang memengaruhi hasil belajar siswa menunjukkan bahwa masih terdapat kendala pada mutu belajar, iklim keamanan, dan kebinekaan. Manajemen kelas tergolong rendah, serta adanya perbedaan antara persepsi mutu dari sisi pendidik dan peserta didik. Isu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman perlu diperhatikan secara serius sebab 24,4% peserta didik berpotensi mengalami perundungan serta kekerasan seksual di satuan pendidikan selama satu tahun terakhir.

Sebagai sumber data Rapor Pendidikan, harus dapat dipastikan bahwa hasil AN valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka harus dipastikan pula bahwa pengambilan sampel siswa untuk melaksanakan AKM harus sesuai yakni sampel secara acak. Di beberapa daerah terdapat temuan bahwa siswa dipilih karena memiliki nilai di atas rata-rata, serta dilakukan pelatihan intensif secara khusus agar siswa mendapatkan nilai tinggi dalam AKM. Survei lingkungan belajar juga harus dipastikan memuat data mengenai kondisi sekolah yang sesungguhnya. Sebab, penekanan dalam AN bukan sekadar hasil akhir, tetapi evaluasi yang berorientasi pada mutu, sistem dan pengumpulan informasi yang terintegrasi, serta mendorong refleksi dan perbaikan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah (Kemendikbudristek) untuk memastikan bahwa Rapor Pendidikan menjadi satu-satunya sumber pengukuran capaian mutu pendidikan yang menyelaraskan pemanfaatan data melalui mekanisme berbagi-pakai data sehingga tidak ada lagi lembar-lembar evaluasi yang tumpang tindih.

Komisi X DPR RI mengawasi dan memastikan pelaksanaan AN sesuai dengan prosedur sehingga hasil AN dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Komisi X DPR RI mendorong pemerataan dan perbaikan mutu pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan guna memperkecil kesenjangan pendidikan antardaerah melalui kerja sama dengan Kemendagri dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Minggu ke-1 April
(1 s.d. 7 April 2022)

Sumber

antaranews.com, 4 April 2022;
detik.com, 1 April 2022;
Kompas, 2 April 2022.

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Nidya Waras Sayekti

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022